



## SOLIDARITAS SOSIAL DAN INTEGRASI SOSIAL: PERSEPSI MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Hertanto<sup>(1 \*)</sup>, Arizka Warganegara<sup>(2)</sup> dan Handi Mulyaningsih<sup>(3)</sup>

<sup>1,2</sup> Department of Government Studies, FISIP, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia.

<sup>3</sup> Department of Sociology, FISIP, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia.

### ARTICLE INFORMATION

**Submitted** : 02<sup>nd</sup> March 2021  
**Review** : 01<sup>st</sup> October 2021  
**Accepted** : 24<sup>th</sup> Nopember 2021  
**Published** : 18<sup>th</sup> December 2021  
**Available Online** : December 2021.

### KEYWORDS

Radicalism; social solidarity; national integration

### CORRESPONDENCE

\*E-mail: [hertanto.1960@fisip.unila.ac.id](mailto:hertanto.1960@fisip.unila.ac.id)

### A B S T R A C T

Researches conducted by the Indonesian Institute of Science (LIPI) and the Indonesian National Counter-Terrorism Agency (BNPT) have revealed that students in some of the major universities in Indonesia have become potentially radical. This study aims to: (a) find out students' perceptions on social solidarity; (b) understand the student perceptions on national integration; (c) analyze the potential of being radical among the students. We conducted a qualitative survey to analyze the student's perception of radicalism, social integration, and national integration. The study results show that: first, the majority of informants have a positive perception toward social solidarity to their fellow citizens in the community who have a different social, cultural, religious, ethnicity and language background. Second, the majority of informants have a very positive perception of national integration. Third, there is no indication of increasing radical behavior among FISIP University of Lampung's students.

## A. PENDAHULUAN

Proses transisi demokrasi dan perjalanan demokratisasi lokal di Indonesia sudah berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) tahun, dan beragam problematika tetap saja menghampiri baik masalah internal dan eksternal demokrasi. Demokratisasi memerlukan waktu untuk menjadi matang akan tetapi kematangan tersebut sangat mungkin tercapai dengan cepat dengan komitmen yang kuat dari para elite. Realitas Demokrasi Indonesia yang masih jauh dari ideal bahkan sebuah majalah ekonomi terkenal, *the Economist* melabeli Demokrasi Indonesia sebagai sebuah model demokrasi cacat yang menyisakan beragam problematika mendasar seperti halnya prevalensi politik uang dan pragmatisme elit (the Economist, 2020).

Secara kuantitatif beragam ukuran statistik menunjukkan ada perbaikan demokrasi di Indonesia terutama jika dibandingkan dengan apa yang terjadi pada masa lalu baik di era Orde Lama maupun Orde Baru. Akan tetapi, secara kualitatif banyak sekali

kritik yang ditujukan pada elit sempena *progress* demokratisasi di Indonesia yang seolah terinterupsi "kuasa politik". Bahkan dalam satu jurnalnya (Mietzner, 2020) menyatakan ada konsentrasi kekuasaan di ranah eksekutif membuat potensi kelompok anti demokrasi menguat dan akan mengganggu pola demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia sejak beberapa dekade yang lalu.

Demokratisasi politik yang berjalan tanpa diikuti proses yang ajeg dalam institusi politik tentu akan berdampak pada reduksi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Kelompok-kelompok kepentingan politik yang menguat pada satu kubu tentu juga akan meminggirkan potensi oposisi yang idealnya mesti dipelihara sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat. Secara teoritik, demokratisasi akan menghasilkan dua kemungkinan narasi demokrasi, menuju arah pendulum positif artinya akan terjadi penguatan institusi politik atau sebaliknya melemahkan institusi politik akibat dari menguatnya

kelompok-kelompok yang berbasis pada pragmatisme ekonomi politik. Sebagai contoh, pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan politik berbiaya tinggi, prevalensi politik uang, pragmatisme elit dan partai politik serta pragmatisme pemilih menjadi masalah substansi demokrasi di Indonesia yang tidak kunjung usai bahkan setelah demokrasi berjalan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Idealnya, pada posisi hari ini, Demokrasi Indonesia sudah sampai pada tahap konsolidasi menuju sistem institusi demokrasi yang maju dan kukuh. Masalah-masalah yang terkait dengan pelemahan demokrasi ini mesti dicari jalan keluarnya. Hal ini kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Dalam konteks lingkungan eksternal, Indonesia juga masih menghadapi kendala sebagai ikutan gagalnya institusi demokrasi bekerja untuk semua kelompok dan yang paling terasa adalah soal luntarnya nasionalisme, wawasan kebangsaan dan tantangan besar mempertahankan solidaritas sosial dan integrasi nasional. Potensi luntarnya solidaritas dan integrasi nasional ini secara teoritik sebagai akibat dari gagalnya institusionalisme politik di Indonesia, hal nyata yang sebenarnya telah menjadi tantangan diawal-awal reformasi politik Indonesia dengan kemunculan gerakan-gerakan insurgensi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti halnya di Riau, Aceh dan Papua.

Pada bagian lain, integrasi nasional juga adalah sebuah konsep yang dinamis (Drake, 2019) dan memerlukan waktu untuk terus bertransformasi walaupun dalam konteks tertentu capaian selama 20 (dua puluh) tahun terakhir agak kurang memuaskan dengan beragam isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang dimunculkan justru oleh para elit politik sendiri seperti yang kerap kali secara tidak proporsional digunakan untuk memperoleh dukungan politik tertentu.

Persoalan internal diatas juga kemudian seolah difasilitasi dengan semakin dominannya sistem ekonomi neo-liberal dan sistem politik liberal yang mengabaikan nilai lokal. Pola kedua sistem tersebut kemudian menghegemoni dunia dengan berbagai implikasi terhadap negara-negara Asia (Blair, 2021), termasuk Indonesia. Menurut Fukuyama, pada era sekarang di mana tidak ada kekuatan penyeimbang pascaruntuhnya Uni Sovyet menyebabkan peradaban Barat merupakan pilihan terakhir yang terbaik (Fukuyama, 1989, 2006). Hegemoni liberalisme mesti diadaptasikan dengan nilai-nilai lokal sehingga menghasilkan sistem sosial, ekonomi dan politik eklektik yang adaptif terhadap kondisi kekinian Indonesia.

Pernyataan dua ilmuwan di atas menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dengan memuaskan. Apakah benar sistem ekonomi kapitalis dan sistem politik demokrasi liberal Barat merupakan pilihan yang terbaik? Apakah benar peradaban manusia telah mencapai konsensus yang menetapkan pilihan pada nilai-nilai dan sistem Barat sebagai fakta keharusan yang tidak bisa dipungkiri?

bagaimana dampak peradaban Barat terhadap wawasan kebangsaan terutama merujuk pada hal spesifik soal persepsi mahasiswa terhadap solidaritas sosial dan integrasi bangsa?

Pada bagian lain, beberapa penelitian sejenis telah dilakukan oleh peneliti bagi melakukan penilaian terhadap wawasan kebangsaan di kalangan mahasiswa dan pelajar. Penelitian yang dilakukan oleh Budimansyah (2010: 7) menyimpulkan bahwa globalisasi menjadi tantangan sendiri bagi wawasan kebangsaan di Indonesia dan salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mereduksi hal tersebut dengan membuat memberikan pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada "citizenship education". Hasil penelitian yang sama juga dijeslakan oleh penelitian Sofyan dan Sundawa (2015), penelitian menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam menjaga kesatuan kebangsaan dan nasionalisme mahasiswa. Penelitian oleh Setiawan (2017), secara kuantitatif memberikan penilaian terhadap wawasan kebangsaan dan nasionalisme mahasiswa, yang menyimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap wawasan kebangsaan mempunyai nilai yang sedang dan untuk memperkuat serta menstimulus pemahaman mahasiswa tentang wawasan kebangsaan. Penelitian ini mengusulkan perlunya pembelajaran yang kontekstual terkait materi wawasan kebangsaan dan integrasi. Penelitian mengaitkan aspek wawasan kebangsaan dan integrasi nasional juga dilakukan oleh (Sukamto, 2017) dan (Dharmawan, 2014). Kedua peneliti memberikan kesimpulan yang sama bahwa aspek pendidikan menjadi katalisator yang baik bagi mempertahankan integrasi nasional serta memantapkan wawasan kebangsaan pada kalangan mahasiswa. Pada bagian lain, penelitian yang kami lakukan mencoba melihat dari sudut pandang yang sama mengenai wawasan kebangsaan dan integrasi nasional, walaupun dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan yang berbeda dengan banyak penelitian yang sudah dilakukan dengan memberikan penilaian melalui survei yang berbasis kualitatif.

Solidaritas sosial, integrasi nasional dan wawasan kebangsaan adalah tiga konsep yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Pada posisi inilah peran anak-anak muda (mahasiswa) menjadi sangat vital menjadi penyeimbang antara kepentingan internal dan eksternal kebangsaan. Tujuan kajian ini adalah memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan di atas. Pertanyaan penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap solidaritas sosial pada tahun politik 2018? *Kedua*, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap integrasi nasional pada tahun politik 2018? *Ketiga*, apakah telah berkembang anasir radikalisme di kalangan mahasiswa?

## B. METODE PENELITIAN

Lune and Berg (2016: 12) menjelaskan penelitian kualitatif adalah “*refers to the meanings, concepts, definitions, characteristics, metaphors, symbols, and descriptions of things.*” Secara spesifik Lune dan Berg, menyatakan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemaknaan terhadap beragam konteks dan teks yang terkait dengan sesuatu yang deskriptif oleh sebab itu memaknai simbol, metaphor dan konsep menjadi bagian yang penting dalam proses penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan survei kualitatif untuk memetakan pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap solidaritas sosial dan integrasi nasional. Menurut (Jansen, 2010) survei kualitatif adalah “*the study of diversity (not distribution) in a population*” yang memfokuskan kajian pada pemaknaan dan pengalaman informan terhadap sebuah peristiwa. Pengumpulan data utama dilakukan dengan melakukan survei kualitatif terhadap mahasiswa FISIP Universitas Lampung. Pengamatan atau observasi untuk menggali informasi juga dilakukan melalui media massa dan media sosial (medsos) terkait dengan fenomena yang sesuai fokus penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) yang telah menempuh enam sampai dengan sepuluh semester. Artinya para informan telah banyak mempelajari teori-teori ilmu sosial dan politik dan cukup memahami aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman ini akan membentuk sikap dan perilaku politik dalam menilai keadaan atau sistem sosial dan politik bangsa dan negaranya.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran informasi yang terkait dengan fokus penelitian yang diteliti. Data yang diperoleh dianalisis dengan melihat persentase pilihan

terhadap beberapa opsi pilihan jawaban dalam angket yang kami berikan pada para informan kemudian direfleksikan dengan kajian teoritik. Informan penelitian ini berjumlah 42 (empat puluh dua) orang berusia antara 20-24 tahun yang meliputi perempuan 71,43% dan laki-laki 28,57%. Mayoritas beragama Islam 95,24%, sedangkan protestan serta katolik masing-masing 2,38%. Mayoritas informan memiliki telepon seluler berbasis android (80,15%) dan yang tidak memiliki hanya (19,15%). Mereka yang memiliki ponsel semua mengakses media sosial (medsos), terutama yang paling sering diakses adalah Facebook (51,39%), WhatsApp (41,67%), dan Instagram (6,94%).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Persepsi Mahasiswa Terhadap Solidaritas Sosial: Survei Kualitatif

Menurut informan, medsos yang paling sering dijadikan media penyebaran konten (berisi) intoleransi dan ujaran kebencian bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan) oleh para pengguna adalah Facebook (FB) 76,59%, sisanya Twitter (6,39%) dan Instagram (17,02%).

Dalam survei yang kami lakukan terhadap mahasiswa FISIP Unila, mayoritas informan sangat setuju (88,09%) dan setuju (11,91%) bahwa Penduduk Indonesia adalah masyarakat yang beragam dalam bidang sosial, budaya, agama, suku, adat istiadat, dan bahasa (Lihat tabel 1). Sikap ini pun didukung oleh kesetujuan informan terhadap realias bahwa Penduduk Lampung adalah masyarakat yang beragam dalam bidang sosial, budaya, agama, suku, adat istiadat, dan bahasa; yaitu sangat setuju (57,14%) dan setuju (40,48%). Sedangkan yang kurang setuju 2,38% (Lihat tabel 1).

**Tabel 1. Persepsi Mahasiswa Terhadap Solidaritas Sosial**

No.	Pernyataan	Jawaban Informan					
		SS	S	TS	KS	STS	TDK
1.	Penduduk Indonesia adalah masyarakat yang beragam dalam bidang sosial, budaya, agama, suku, adat istiadat, dan bahasa.	37	5	0	0	0	0
2.	Penduduk Lampung adalah masyarakat yang beragam dalam bidang sosial, budaya, agama, suku, adat istiadat, dan bahasa.	24	17	0	1	0	0
3.	Warga di sekitar rumah saya adalah masyarakat yang beragam dalam bidang sosial, budaya, agama, suku, adat istiadat, dan bahasa.	13	23	4	2	0	0
4.	Saya merasa nyaman bertetangga dengan warga yang beragama lain (tidak seiman).	14	24	1	3	0	0

5.	Saya merasa nyaman bertetangga dengan warga yang berbeda suku/etnis.	16	25	0	1	0	0
----	--	----	----	---	---	---	---

Keterangan :

- SS : jika jawaban informan Sangat Setuju
- S : Setuju
- TS : TidakSetuju
- KS : Kurang Setuju
- STS : Sangat TidakSetuju
- TDK : Tidak Menjawab

Kedua sikap di atas sejalan dengan sikap informan terhadap kesadaran bahwa warga di sekitar rumahnya adalah masyarakat yang beragam dalam bidang sosial, budaya, agama, suku, adat istiadat, dan bahasa; yaitu sangat setuju (30,95%), setuju (54,76%), tidak setuju 9,52% dan kurang setuju (4,76%). Oleh karena itu, mayoritas informan merasa nyaman bertetangga dengan warga yang beragama lain (tidak seiman): sangat setuju 33,33% dan setuju 57,14%. Sedangkan yang tidak setuju 2,39% dan kurang setuju 7,14%.

Sejalan dengan sikap tersebut, informan menyatakan merasa nyaman bertetangga dengan warga yang berbeda suku/etnis, yaitu sangat setuju 38,09% dan setuju 59,52%. Sedangkan yang kurang setuju 7,14%. Beberapa sikap tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas informan memiliki persepsi yang positif terhadap solidaritas sosial kepada sesama warga di lingkungannya, di masyarakat, dan pada tingkat bangsa yang memiliki perbedaan secara sosial dan budaya, agama, suku, adat istiadat, dan bahasa.

## 2. Persepsi Mahasiswa Terhadap Integrasi Nasional

Integrasi bangsa/nasional dikaji dari persepsi (pengetahuan, pemahaman, penilaian) informan terhadap ideologi negara-bangsa dan sikap terhadap persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mayoritas informan sangat setuju (85,71%) dan setuju (14,29%) bahwa Pancasila adalah ideologi negara sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia (Lihat tabel 2). Sikap ini pun didukung oleh ketidaksetujuan informan terhadap strategi partai politik (parpol) dan atau calon eksekutif dan legislatif (caleg) yang menggunakan kampanye dengan isu primordial dan SARA (suku, agama, ras, antar-golongan); yaitu sangat tidak setuju (52,38%), tidak setuju (26,19%), dan kurang setuju (14,29%). Sedangkan yang setuju 4,76% dan sangat setuju 2,38% (Lihat tabel 2).

Kedua sikap di atas sejalan dengan sikap ketidaksetujuan informan terhadap strategi parpol/calon yang menggunakan kampanye negatif (menyebarkan aib dan keburukkan personal); yaitu sangat tidak setuju (66,67%), tidak setuju (23,81%), dan kurang setuju (9,52%). Oleh karena itu, mayoritas informan juga merasa tidak nyaman dengan strategi parpol/calon yang menggunakan kampanye “hitam” (menyebarkan kebohongan dan fitnah), yaitu sangat tidak setuju 76,19%, tidak setuju 19,05%, dan kurang setuju 4,76% (Lihat tabel 2).

**Tabel 2. Persepsi Mahasiswa Terhadap Integrasi Nasional**

No.	Pernyataan	Jawaban Informan					
		SS	S	TS	KS	STS	TDK
1.	Pancasila adalah ideologi negara sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia.	36	6	0	0	0	0
2.	Bagaimana menurut anda strategi parpol/calon yang menggunakan kampanye dengan isu primordial & SARA (suku, ras, agama, etnis).	1	2	11	6	22	0
3.	Bagaimana menurut anda strategi parpol/calon yang menggunakan kampanye negatif (menyebarkan aib dan keburukkan personal).	0	0	10	4	28	0
4.	Bagaimana menurut anda strategi parpol/calon yang menggunakan kampanye “hitam” (menyebarkan kebohongan dan fitnah).	0	0	8	2	32	0

Keterangan :

SS : jika jawaban informan Sangat Setuju  
 S : Setuju  
 TS : TidakSetuju  
 KS : Kurang Setuju  
 STS : Sangat TidakSetuju  
 TDK : Tidak Menjawab

Beberapa sikap tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas informan memiliki persepsi yang sangat baik/positif terhadap integrasi bangsa/nasional bagi tegaknya NKRI. Bahkan dari tiga sikap terakhir menunjukkan tren kenaikan/penguatan ketidaksetujuan (sangat tidak setuju) informan terhadap kampanye pemilu/pilkada yang mengarah kepada perpecahan bangsa, yaitu 52,38%, 66,67%, 76,19%; dan rata-rata kenaikan ini adalah 11,91%.

### 3. Radikalisme di Kalangan Mahasiswa

Indikasi radikalisme dikaji dari faktor yang berkaitan dengan sentimen dan fanatisme yang berlandaskan pada primordialisme. Dalam kehidupan sehari-hari gejala primordialisme lebih nampak pada fanatisme agama, etnik dan ras, sedangkan yang berlandaskan pada gender, kelas, dan kedaerahan kurang menonjol. Gejala ini dalam studi ilmu politik dikenal sebagai politik identitas.

Informan menyatakan sangat setuju (21,43%) dan setuju (33,33%) bahwa sebaiknya dalam memilih calon pilkada/caleg yang punya kesamaan agama agamanya. Namun sebagian yang lain menyatakan kurang setuju (23,81%), tidak setuju (14,29%), dan sangat tidak setuju 7,14% (Lihat tabel 3 poin 1). Sikap ini pun didukung oleh pernyataan informan bahwa sebaiknya dalam memilih calon kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang satu agama atau sama agamanya; yaitu sangat tidak setuju (7,14%); tidak setuju (14,29%), dan kurang setuju (26,19%). Sedangkan yang sangat setuju 21,43% dan yang menyatakan setuju 30,95% (Lihat tabel 3 poin 3).

Demikian pun mayoritas informan juga menyatakan bahwa sebaiknya dalam memilih calon anggota legislatif (caleg) dari parpol yang satu agama atau sama agamanya; yaitu sangat tidak setuju (11,91%), tidak setuju (30,95%), dan kurang setuju (42,86%). Sedangkan yang setuju 14,29% dan sangat setuju tidak ada (Lihat tabel 3 poin 6).

**Tabel 3. Persepsi Mahasiswa Terhadap Politik Identitas**

No.	Pernyataan	Jawaban Informan					
		SS	S	TS	KS	STS	TDK
1.	Sebaiknya kita memilih calon pilkada/caleg yang satu agama atau sama agamanya.	9	14	6	10	3	0
2.	Sebaiknya kita memilih calon pilkada/caleg yang satu suku/etnis atau sama suku/etnisnya.	0	5	18	16	2	0
3.	Sebaiknya kita memilih calon kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang satu agama atau sama agamanya.	9	13	6	11	3	0
4.	Sebaiknya kita memilih calon kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang satu suku/etnis atau sama suku/etnisnya.	0	6	17	15	4	0
5.	Sebaiknya kita memilih calon anggota legislatif (caleg) parpol yang satu agama atau sama agamanya.	5	14	8	11	4	0
6.	Sebaiknya kita memilih calon anggota legislatif (caleg) yang satu suku/etnis atau sama suku/etnisnya.	0	6	13	18	5	0

Keterangan	:
SS	: jika jawaban informan Sangat Setuju
S	: Setuju
TS	: TidakSetuju
KS	: Kurang Setuju
STS	: Sangat TidakSetuju
TDK	: Tidak Menjawab

Adapun dalam hal etnisitas sebagai orientasi dalam memilih calon pemimpin politik, informan menyatakan bahwa sebaiknya memilih calon pilkada/caleg yang satu suku/etnis atau punya kesamaan suku/etnisnya; yaitu sangat tidak setuju (4,76%), tidak setuju (42,86%), dan kurang setuju (38,09%). Sedangkan yang setuju 11,91% dan tidak ada yang menyatakan sangat setuju (Lihat tabel 3 poin 2). Sikap ini didukung mayoritas informan yang menyatakan bahwa sebaiknya dalam memilih calon kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang satu suku/etnis atau sama suku/etnisnya, yaitu sangat tidak setuju 9,52%, tidak setuju 40,48%, dan kurang setuju 35,71% (Lihat tabel 3 poin 4). Sedangkan yang setuju 14,29% dan tidak ada yang menyatakan sangat setuju (Lihat tabel 3 poin 4). Kedua sikap di atas sejalan dengan sikap orientasi informan bahwa sebaiknya dalam memilih calon anggota legislatif (caleg) yang memiliki satu suku/etnis atau sama suku/etnisnya; yaitu sangat tidak setuju (11,91%), tidak setuju (30,95%), dan kurang setuju (42,86%). Sedangkan yang setuju 14,29% dan tidak ada yang menyatakan sangat setuju (Lihat tabel 3 poin 6). Beberapa sikap tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas informan memiliki persepsi yang sangat baik/positif terhadap integrasi bangsa/nasional bagi tegaknya NKRI. Kecenderungan mayoritas informan (rata-rata 67,85%) tidak mendasarkan orientasi politiknya atas dasar agama dan etnisitas. Namun demikian tidak sedikit prosentase informan (rata-rata 32,15%) yang mendasarkan orientasi memilih pemimpin dalam pemilu/pilkada berdasarkan politik identitas.

Lampung sebuah provinsi di bagian selatan Pulau Sumatera terkenal akan kemajemukan dan keberagaman suku dan etnis. Program transmigrasi di masa lalu menjadikan konfigurasi suku di Lampung relatif sangat beragam dibandingkan daerah lain secara umum di Indonesia. Program transmigrasi di masa kolonial, Orde Lama dan Orde Baru berkontribusi signifikan terhadap beragamnya konfigurasi suku bangsa di Lampung (Fernanda & Samsuri, 2020). Pada bagian lain, Universitas Lampung sebagai institusi utama di Provinsi Lampung juga mempunyai peran yang sangat vital dalam konteks memberikan dan menyampaikan pentingnya wawasan kebangsaan dan integrasi nasional pada para mahasiswa.

Dalam konteks ini, survei yang melibatkan mahasiswa juga dirasa menjadi sangat penting bagi memberikan gambaran sejauh mana pemahaman akan solidaritas sosial dan integrasi nasional di kalangan mahasiswa. Tantangan kebangsaan baik

yang sifatnya internal dan eksternal. Pembangunan institusi demokrasi yang masih jauh dari sempurna menjadikan proses kebangsaan kerap kali terinterupsi oleh kuasa elit, dan pada posisi ini peran mahasiswa sangat penting dalam mereduksi hal tersebut. Buehler (2010) menjelaskan masalah mendasar demokrasi di Indonesia terletak pada partisipasi politik yang masih elitis dan tidak memberikan ruang gerak yang luas terhadap kelompok "orang biasa" atau *common people*. Hal ini juga yang kemudian berkontribusi pada pelemahan institusi demokrasi termasuk di dalamnya tantangan terhadap solidaritas sosial dan integrasi nasional termasuk potensi tumbuh dan berkembangnya radikalisme akibat frustrasi sosial. Pendapat Buehler ini bisa dipakai sebagai variabel analisis bahwa partisipasi politik yang elitis ini juga dapat menyebabkan ruang gerak demokrasi tidak leluasa dan mesti dimunculkan dan diperkuat terutama pada kelompok sadar politik seperti kalangan mahasiswa.

Penelitian ini secara konseptual memberikan pandangan bahwa demokrasi yang tidak terinstitusionalkan secara baik akan mempengaruhi pola pikir mahasiswa dalam melihat solidaritas sosial dan integrasi bangsa. Akan tetapi penelitian ini mendapatkan temuan yang berbeda, di mana mahasiswa FISIP Universitas Lampung ternyata masih memiliki semangat dan nasionalisme yang relatif baik.

Secara umum data hasil survei di atas memberikan beberapa indikasi positif. *Pertama*, masih tingginya nasionalisme di kalangan mahasiswa FISIP Universitas Lampung. *Kedua*, hasil survei juga mengindikasikan bahwa mahasiswa memahami politik identitas hanya sebagai alat untuk meraih dukungan bukan yang utama dalam satu pilihan politik. Hal ini senada dengan yang diungkap oleh beberapa peneliti seperti Aspinall, dkk (2011: 55) yang menyatakan bahwa "*analysts of ethnic identity and electoral politics have investigated how political elites and voters engage specific identities in order to maximize their opportunity for success and to increase their access to resources*". *Ketiga*, mahasiswa juga melihat bahwa Pancasila masih menjadi nilai pemersatu bangsa yang efektif. *Keempat*, solidaritas sosial masih sangat melekat di kalangan mahasiswa FISIP Unila walaupun dalam konteks tertentu persepsi pada pilihan politik dan standar nilai pilihan politik masing-masing memiliki perbedaan.

Beragam temuan penelitian di atas memberikan sebuah indikasi bahwa pada aras domestik, reformasi politik masih terus berjalan untuk

menghasilkan kultur demokrasi lokal yang akan lebih matang dalam beberapa waktu ke depan. Hal yang menjadi fokus kebangsaan saat ini adalah membuat persepsi yang sama soal demokrasi, bahwa demokrasi adalah alat bukan tujuan dari berbangsa. Demokrasi mesti dimaknai secara arif dan positif bukan meliberalkan nilai kebangsaan yang sudah terpatrit dalam semangat *nation state* Indonesia yang berteraskan Pancasila. Sebuah rencana aksi yang tidak mudah untuk dilakukan.

Walau bagaimana pun data yang dianalisis tidak menemukan indikasi yang menunjukkan pemanfaatan sentimen etnis dan agama untuk pemenangan para calon kepala daerah (Pilkada). Artinya persoalan yang dapat memecah belah solidaritas sosial mahasiswa ternyata tidak ditemukan dalam survei kajian ini. Hasil observasi kami menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung menganggap perbedaan pilihan politik adalah hal yang biasa. Penggunaan sentimen SARA dalam arena Pilkada memang menjadi sangat lazim Indonesia pasca-Orde Baru, setidaknya beberapa assesmen terkait hal itu sudah dilakukan oleh banyak peneliti (Aspinall, 2011; Aspinall et al., 2011; Mietzner, 2020; Tanasaldy, 2007).

Data survei juga memberi gambaran secara umum mahasiswa cenderung bersikap moderat dan hati-hati dalam menyikapi politik identitas. Sebagian kecil memang ada yang setuju memilih calon (pilkada, legislatif) yang harus memiliki kesamaan latar belakang etnis dan agama, tetapi pilihan itu terlihat moderat manakala angka yang kurang setuju terhadap hal tersebut menunjukkan *nisbah* yang lebih besar sehingga survei ini mengindikasikan bahwa sentimen etnis dan agama dapat dipakai sebagai salah satu isu meraih dukungan politik di kalangan mahasiswa namun masih dalam level yang moderat.

Pada awalnya diasumsikan bahwa politik identitas yang dimainkan elit politik akan mengakibatkan disintegrasi pada masyarakat pasca pilkada, terutama di kalangan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan beragam penelitian yang dilakukan oleh para peneliti seperti halnya (Mietzner, 2020; Suryadinata, 2019). Bahkan dalam tulisannya Mietzner menuliskan "*in the most case of identity politics, political actors harvest the resentment of a socio demographics majority to mobilize against minorities seen as threatening the majority's identity. Campaign based on identity minorities, therefore, often coincide with the questioning, or open violation, of minority citizen's civil right*" (Mietzner, 2020: 6).

Pendapat Mietzner di atas sangat relevan dengan kondisi kekinian Indonesia terutama jika melihat dari perspektif tantangan terhadap disintegrasi bangsa akibat pola-pola kampanye yang massif menggunakan identitas politik sebagai alat memperoleh dukungan politik. Penggunaan identitas politik yang massif juga menyebabkan beragam pengkotakkan berbasis SARA terjadi setiap pemilihan umum digelar. Dalam konteks ini, peran pemuda dan mahasiswa dapat difungsikan sebagai

penyeimbang perilaku pragmatisme elit tersebut. Peran mahasiswa sebagai katalisator pembangunan dan integrasi bangsa telah dibuktikan pada banyak negara. Di negara demokrasi maju seperti halnya Amerika Serikat misalkan, dikenal sosok Bernie Sanders sebagai aktivis mahasiswa yang saat ini menjadi salah satu tokoh politik berpengaruh di Amerika Serikat, sama halnya dengan tokoh seperti Mahathir Muhammad dan Anwar Ibrahim di Malaysia. Peran-peran inklusif itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa di era reformasi ketika cabaran hegemoni liberalisme dan keterbukaan informasi publik menjadi hal utama yang mempengaruhi *mind set* mahasiswa untuk menjadi lebih apatis terhadap perubahan dan cenderung menjadi *status quo*.

Dalam level daerah sebenarnya pemberdayaan peran mahasiswa juga diperlukan sebagai agen pembangunan daerah yang inklusif berpihak pada kepentingan masyarakat kecil. Hal ini relevan ketika banyak pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan persoalan utama pembangunan, yaitu pengentasan kemiskinan. Hal yang kemudian menciderai semangat kebangsaan dan bisa saja berdampak pada integrasi nasional secara umum. Pada bagian lain, kondisi ini diperparah dengan tidak berjalannya reformasi birokrasi yang mengarah kepada peningkatan layanan publik serta meluasnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akan tetapi hasil survei ini mengindikasikan bahwa mahasiswa relatif bijak dalam menyikapi permainan politik identitas yang dilakukan oleh kalangan elit sempena Pilkada.

Sementara dalam konteks internasional, di tengah arus deras globalisasi dewasa ini, konsep wawasan kebangsaan sedang menemui tantangan dengan berkembangnya gelombang populisme dunia (Algan, Guriev, Papaioannou, & Passari, 2017; DeHanas & Shterin, 2018; Inglehart & Norris, 2016; Parcon, 2021; Wodak, 2021). Fenomena ini ditandai melejitnya popularitas partai-partai ekstrem kanan yang antimigran, anti-Muslim, dan anti-integrasi Eropa termasuk di dalamnya muncul argumen-argumen yang menyesatkan soal *post truth politics* (PTP) (De Blasio & Selva, 2021; Wodak, 2021). Pada bagian lain, Lockie (2017: 2) mendefinisikan *post truth politics* sebagai "*Usage of the term 'post-truth' may well be novel, but there is nothing novel about the authoritarian impulse implicit in such open contempt for truthfulness*".

Wawasan kebangsaan kemudian menjadi sangat *absurd* ketika dibenturkan dengan argumen Fukuyama (2006) yang menyatakan pasca-Perang Dingin dunia akan cenderung menjadi sangat kapitalistik. Walaupun dalam konteks kekinian argumen Fukuyama ini patut dikoreksi setelah terjadinya perubahan ekonomi global pascareseki ekonomi tahun 2007-2009 yang membagi dunia dalam kesejangan ekonomi yang berkepanjangan dan disrupsi yang tidak terprediksi seperti halnya pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi warga dunia hari ini.

Faktor eksternal tersebut di atas didukung dengan ketidakpastian pembangunan Demokrasi di Indonesia. Kebebasan sipil dan politik yang didukung oleh meningkatnya teknologi informasi memungkinkan setiap warga negara menyampaikan pendapat secara bebas. Salah satu bentuk kebebasan yang terinterupsi tersebut adalah munculnya berbagai opini negatif yang berterasakan sentimen SARA yang bersifat ekstrem dan radikal di media sosial. Fenomena ini semakin deras manakala dilatarbelakangi persaingan politik dalam arena pemilu dan pilkada. Potensi penggunaan SARA dalam kontestasi politik tanah air menjadi semakin dominan pasca-Pemilu 2014. Dalam pandangan Mietzner (2020), hal tersebut sebagai bentuk dari inovasi otoritarianisme. Pola politik yang berbasis *by nature* elite sentris pada akhirnya akan membuat sistem politik dipenuhi dengan kepentingan politik elit yang berbasis pada kepentingan ekonomi elit. Dalam konteks inilah, mahasiswa perlu dihadirkan sebagai *the outsider* atau orang luar yang berperan sebagai penyeimbang kepentingan elit dan rakyat dalam ranah sistem politik.

Realitas hasil temuan kajian ini menunjukkan bahwa wawasan sosial politik Indonesia yang meliputi bersatunya ribuan pulau, suku, dan etnis bukan lagi permasalahan geografis dan etnologis, serta "persamaan" budaya dan bahasa; melainkan karena ada "kebutuhan", baik secara politik, sosial, ekonomi, maupun budaya untuk bersatu (Elson, 2009). Kekhawatiran tergerusnya dan erosi nasionalisme pada tahun politik karena kerasnya persaingan memperebutkan suara pemilih, baik oleh parpol dan para pendukungnya belum terbukti secara signifikan. Justru yang perlu dikhawatirkan terjadinya erosi solidaritas sosial dan integrasi bangsa/nasional dalam bentuk "miskin kepedulian" dari mayoritas warga negara Indonesia terhadap salah satu permasalahan pembentukan kebangsaan. Kebangsaan akan terbangun dengan kuat apabila ada kepedulian terhadap nasib saudara sebangsa, menurut Sari and Samsuri (2020: 143) "*Kemajemukan bangsa Indonesia melahirkan banyak sekali wacana yang perlu dipelajari dan ditanamkan sejak dini, seperti salah satunya mengenai integrasi nasional*".

Dalam konteks yang lain Globalisme negara juga menyebabkan tantangan itu tidak hanya dalam konteks lokal dan nasional justru tantangan terbesar adalah anasir globalisme yang secara simultan dapat menggerus paham dan kebudayaan anak bangsa yang pada satu sisi akan sangat bermanfaat bagi proses integrasi dan komunalisme bangsa. Hal tersebut juga akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi meredefinisi wawasan kebangsaan dan integrasi nasional kita. Mahasiswa sebagai kalangan muda terdidik sangat potensial menjadi sasaran menyebarnya benih-benih radikalisme yang berkembang dalam bentuk ujaran kebencian dan sikap intoleran.

Membangkitkan kepedulian akan nasionalisme menjadi tantangan terbesar institusi kampus pada era globalisme seperti sekarang. Sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Kepedulian dapat ditunjukkan antara lain dengan mewacanakan dan menghargai prestasi positif, mengkritik kekurangan secara konstruktif, dan membangun ide-ide kreatif inovatif dalam aksi-aksi konkret yang akan membawa dampak langsung bagi upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Potensi untuk menggagas lebih dalam kepedulian atas nasionalisme secara kultural akan sangat mungkin dilakukan oleh para pemuda yang dalam hal ini diwakilkan oleh kalangan mahasiswa itu sendiri. Survei di atas memberikan indikasi bahwa nasionalisme dan politik identitas masih menjadi bagian yang penting dalam persepsi mahasiswa. Secara umum hal ini merupakan indikasi yang baik bahwa mahasiswa dalam konteks survei kajian ini masih dapat diharapkan sebagai garda terdepan bangsa menjaga ritme nasionalisme bangsa.

Pada akhirnya, kekompakan segala lapisan bangsa dalam membangun negara akan bernilai positif di mata dunia internasional. Dengan demikian akan terbangun nasionalisme dalam pengertian luas sebagai sebuah "negara-bangsa" yang menekankan aspek persatuan dan kebersamaan, serta menghindari tumbuhnya nasionalisme dalam arti sempit, eksklusif, dan primordial. Nasionalisme eksklusif adalah bentuk kegagalan dari *nation-building*; sedangkan radikalisme adalah bentuk kegagalan nasionalisme bangsa dalam mereduksi anasir keberagaman dalam sebuah *nation state* (negara bangsa) seperti halnya negara bangsa Indonesia.

#### D. KESIMPULAN

Persepsi (pengetahuan, pemahaman, dan penilaian) mahasiswa FISIP Unila terhadap solidaritas sosial dan integrasi bangsa sangat baik dan positif. Bahkan kekhawatiran sementara kalangan terhadap berkembangnya paham radikal di kalangan mahasiswa sebagai akibat media sosial tidak terbukti. Terdapat beberapa kesimpulan dalam penelitian ini. **Pertama**, mayoritas informan memiliki persepsi yang positif terhadap solidaritas sosial kepada sesama warga di lingkungannya, di masyarakat, dan pada tingkat bangsa yang memiliki perbedaan secara sosial, budaya, agama, suku, adat istiadat, dan bahasa. **Kedua**, mayoritas informan memiliki persepsi yang sangat baik/positif terhadap integrasi bangsa/nasional bagi tegaknya NKRI. Bahkan dari tiga sikap yang dikaji menunjukkan tren kenaikan/penguatan ketidaksetujuan informan (sangat tidak setuju) terhadap kampanye pemilu/pilkada yang mengarah kepada perpecahan bangsa, yaitu 52,38%; 66,67%; 76,19%; dan rata-rata kenaikan ini adalah 11,91%. **Ketiga**, tidak ada indikasi tumbuhnya benih-benih paham radikalisme di kalangan mahasiswa FISIP

Unila. Mayoritas informan memiliki persepsi yang sangat baik/positif terhadap integrasi bangsa/nasional bagi tegaknya NKRI. Kecenderungan mayoritas informan (rata-rata 67,85%) tidak mendasarkan orientasi politiknya atas dasar agama dan etnisitas yang diasumsikan sebagai indikasi dari paham radikalisme. Dengan demikian, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung memiliki wawasan politik kebangsaan sesuai dengan ideologi negara dan Undang-undang Dasar 1945.

Hasil penelitian yang kami lakukan mengusulkan beberapa rekomendasi yang akan sangat bermanfaat bagi institusi FISIP Unila dan juga kampus lain pada umumnya bagi mereduksi potensi radikalisme mahasiswa. *Pertama*, tindakan radikal akan berpotensi muncul di kalangan mahasiswa jika pengayaan materi perkuliahan sangat monoton dan kurang memperhatikan aspek budaya lokal Indonesia yang dikenal sangat toleran terhadap perbedaan agama dan suku. Dalam konteks hasil penelitian ini mengusulkan perlu dipikirkan agar konten muatan lokal (budaya) menjadi bagian penting dari kurikulum pembelajaran

utama pada tingkat universitas. *Kedua*, walaupun secara umum kami tidak menemukan gejala radikalisme di kalangan mahasiswa akan tetapi sebagai langkah antisipatif kampus perlu meminimalisir potensi radikal dengan mengadakan kegiatan yang sifatnya memacu penalaran dan kreativitas mahasiswa dan kegiatan seperti ini dapat difasilitasi oleh kampus terkait. *Ketiga*, pendidikan ideologi negara seperti Pancasila mesti dilengkapi dengan muatan yang lebih pratikal seperti kegiatan konkret yang menggagas sikap toleransi di tengah keberagaman bangsa.

## E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Dosen Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung serta mitra bestari yang sudah meluangkan waktu melakukan tinjauan akademik terhadap hasil penelitian yang kami lakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algan, Yann, Guriev, Sergei, Papaioannou, Elias, & Passari, Evgenia. (2017). The European trust crisis and the rise of populism. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2017(2), 309-400.
- Aspinall, Edward. (2011). Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses. *East Asian Studies*, 11, 289-319. doi:doi:10.1017/S159824080007190
- Aspinall, Edward, Dettman, Sebastian, & Warburton, Eve. (2011). When religion trumps ethnicity: a regional election case study from Indonesia. *South East Asia Research*, 19(1), 27-58. doi:10.5367/sear.2011.0034
- Blair, David. (2021). Will Liberal Hegemony Lead to a Cold War in Asia? *Consensus or Conflict?* (pp. 29-40): Springer.
- Budimansyah, Dasim. (2010). Tantangan globalisasi terhadap pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di sekolah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 11(1), 8-16.
- Buehler, Michael. (2010). Decentralisation and Local Democracy in Indonesia: The Marginalisation of the Public Sphere *Problems of democratisation in Indonesia* (pp. 267-285): ISEAS Publishing.
- De Blasio, Emiliana, & Selva, Donatella. (2021). Who Is Responsible for Disinformation? European Approaches to Social Platforms' Accountability in the Post-Truth Era. *American Behavioral Scientist*, 65(6), 825-846.
- DeHanas, Daniel Nilsson, & Shterin, Marat. (2018). Religion and the Rise of Populism: Taylor & Francis.
- Dharmawan, Nyoman Sadra. (2014). Implementasi pendidikan karakter bangsa Pada mahasiswa di perguruan tinggi. *Makalah dipresentasikan pada Pembinaan Pendidikan Karakter bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII, Universitas Udayana Denpasar.*
- Drake, Christine. (2019). *National integration in Indonesia: Patterns and policies*: University of Hawaii Press.
- Elson, Robert Edward. (2009). *The idea of Indonesia*: Penerbit Serambi.
- Fernanda, Fitra Endi, & Samsuri, Samsuri. (2020). Mempertahankan Piiil Pesenggiri Sebagai Identitas Budaya Suku Lampung. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(2), 168-177.
- Fukuyama, Francis. (1989). The end of history? *The national interest*(16), 3-18.
- Fukuyama, Francis. (2006). *The end of history and the last man*: Simon and Schuster.
- Inglehart, Ronald F, & Norris, Pippa. (2016). Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash. *HKS Faculty Research Working Paper Series RWP16-026*.
- Jansen, Harrie. (2010). *The logic of qualitative survey research and its position in the field of social research methods*. Paper presented at the Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research.
- Lockie, Stewart. (2017). Post-truth politics and the social sciences. *Environmental Sociology*, 3(1), 1-5. doi:https://doi.org/10.1080/23251042.2016.1273444

- Lune, Howard, & Berg, Bruce L. (2016). *Qualitative research methods for the social sciences*: Pearson Higher Ed.
- Mietzner, Marcus. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021-1036. doi:<https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- Parcon, Ian Clark R. (2021). Understanding Duterteismo: Populism and Democratic Politics in the Philippines. *Asian Journal of Social Science*. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ajss.2021.03.001>
- Sari, Elia Nurindah, & Samsuri, Samsuri. (2020). Etnosentrisme dan Sikap Intoleran Pendatang Terhadap Orang Papua. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 142-150. doi:<https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p142-150.2020>
- Setiawan, Deny. (2017). Kontribusi Tingkat Pemahaman Konsepsi Wawasan Nusantara terhadap Sikap Nasionalisme dan Karakter Kebangsaan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 9(1), 20-33.
- Sofyan, Fitri Silvia, & Sundawa, Dadang. (2015). Hubungan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24(2), 185-198.
- Sukamto, Sukamto. (2017). *Nasionalisme, Wawasan Kebangsaan dan Integrasi Bangsa Dalam Pengembangan PIPS*. Paper presented at the Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial.
- Suryadinata, Leo. (2019). Identity Politics in Indonesia: The Meliana Case. *ISEAS Perspectives*, 4, 1-8.
- Tanasaldy, Taufiq. (2007). Ethnic identity politics in West Kalimantan *Renegotiating Boundaries* (pp. 349-371): Brill.
- the Economist. (2020). Global democracy has another bad year. Retrieved from <https://www.economist.com/graphic-detail/2020/01/22/global-democracy-has-another-bad-year>
- Wodak, Ruth. (2021). From Post-Truth to Post-Shame: Analyzing Far-Right Populist Rhetoric. *Approaches to Discourse Analysis*, 175.